

Women's Emancipation in Their Contribution to Economic Development in the Surakarta Residency Region 2016-2020

Ririn Maela Sari¹, Muhammad Arif²

¹ Department of Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

² Department of Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

✉ b300180236@student.ums.ac.id, arifmdev@gmail.com

Abstract

Gender refers to the relationship between men and women and how these social relationships are constructed. Gender inequality occurs in all aspects of life. The results of human development do not provide equitable benefits between men and women and have not been effective enough in increasing women's development achievements in the fields of education, employment and the economy. Gender inequality in rights, resources, and political access not only harms women in general but also harms members of society as well as hinders development. Low gender equality will limit productivity, economic growth and reduce overall development efficiency.

This study aims to determine the effect of the gender development index, gender empowerment index, women's involvement in parliament, the average length of schooling for women and the number of female civil servants on economic development in the Surakarta residency area in 2016-2020. This study uses secondary data with panel data regression analysis. Panel data is a combination of cross section and time series data. The model chosen in this study is to use the Fixed Effect Model (FEM) method after performing the Chow test and Hausman test. The results of this study indicate that simultaneously the variables of the gender development index, gender empowerment index, women's involvement in parliament, the average length of schooling for women and the number of female civil servants have an effect on economic growth. Partially, the gender development index variable has a negative and insignificant effect, the gender empowerment index has a positive and insignificant effect, the involvement of women in parliament has a positive and insignificant effect, the average length of schooling for women has a negative and significant effect, and the number of female civil servants has a negative effect. and significant to economic growth.

Keywords: *Economic growth; Gender Development Index; Gender Empowerment Index; Involvement of Women in Parliament; Women's Average Length of Schooling; Number of Female Civil Servants*

Emansipasi Perempuan dalam Kontribusinya pada Pembangunan Ekonomi di Wilayah Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2020

Abstrak

Gender merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Ketimpangan gender terjadi di semua aspek kehidupan. Hasil pembangunan manusia tidak memberikan manfaat yang adil antara laki-laki dan perempuan belum cukup efektif dalam meningkatkan pencapaian pembangunan perempuan dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan ekonomi. ketimpangan gender dalam hak, sumberdaya, maupun akses politik tidak hanya merugikan perempuan secara umum tetapi juga merugikan anggota masyarakat sekaligus menghambat pembangunan. Rendahnya kesetaraan gender akan membatasi produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi efisiensi pembangunan secara

keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, keterlibatan perempuan di parlemen, rata-rata lama sekolah perempuan dan jumlah pegawai negeri sipil perempuan terhadap pembangunan ekonomi di wilayah karesidenan Surakarta tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis regresi data panel. Data panel yaitu gabungan antara data cross section dan time series. Adapun model yang terpilih dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Fixed Effect Model (FEM)* setelah melakukan uji chow dan uji hausman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, keterlibatan perempuan di parlemen, rata-rata lama sekolah perempuan dan jumlah pegawai negeri sipil perempuan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial variabel indeks pembangunan gender berpengaruh negatif dan tidak signifikan, indeks pemberdayaan gender berpengaruh positif dan tidak signifikan, keterlibatan perempuan di parlemen berpengaruh positif dan tidak signifikan, rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh negatif dan signifikan, dan jumlah pegawai negeri sipil perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Pembangunan Gender; Indeks Pemberdayaan Gender; Keterlibatan Perempuan di Parlemen; Rata-rata Lama Sekolah Perempuan; Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan

1. Pendahuluan

Proses pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal. Salah satu indikator yang selalu dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi, karena variabel ini dapat mudah diukur secara kuantitatif (1). Pembangunan ekonomi memperlihatkan banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Tujuan pembangunan ini yaitu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda. Suatu negara dapat dikatakan maju apabila melihat tingginya pembangunan di seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Dalam hal tersebut pembangunan sering dibahas mengenai perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (2).

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban serta kondisi kualitas hidup adalah sama. Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan (3). Ada dua indikator untuk mengukur aspek gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, akan tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender mempunyai fungsi untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah, dimana dalam pengukuran parameternya dipisahkan menurut jenis kelamin. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan, apabila semakin besar jarak IPG dengan nilai 100, maka semakin besar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan (4). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan

keputusan pada bidang politik dan ekonomi yang mencakup partisipasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi, sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (5).

Dalam penelitian Kertai (2021) mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) terdapat di beberapa daerah relatif rendah bahkan memiliki capaian atau angka IPG yang menunjukkan ketimpangan dalam pembangunan gender. Begitu juga dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang memiliki capaian rendah di beberapa daerah terutama antara Kabupaten/Kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender masih belum merata di antar wilayah terutama antar Kabupaten/Kota (6).

Nilai Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender pada tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki nilai setiap tahunnya yang berbeda-beda. Demikian pula di wilayah karesidenan Surakarta. Karesidenan Surakarta memiliki 6 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Kota Surakarta. Masing-masing Kabupaten/Kota tersebut mempunyai kondisi geomorfologi yang berbeda-beda, kondisi tersebut akan berdampak pada terciptanya kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Kondisi sosial seperti kesehatan dan pendidikan serta kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pencapaian nilai Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di wilayah karesidenan Surakarta.

Nilai indeks pembangunan gender di wilayah karesidenan Surakarta pada tahun 2016-2020 menunjukkan terdapat ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan yang ditunjukkan dengan nilai indeks pembangunan gender terdapat jarak yang kecil dengan angka 100. Seluruh nilai indeks pembangunan gender di wilayah karesidenan Surakarta lebih tinggi dari nilai indeks pembangunan gender di provinsi Jawa Tengah dan Indonesia dengan rata-rata di atas 90,00 persen. Oleh karena itu peneliti mengambil wilayah karesidenan Surakarta sebagai lokasi penelitian dan hasilnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indeks pembangunan gender kabupaten/kota di wilayah karesidenan surakarta tahun 2016-2020 (angka indeks)

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Karanganyar	96,55	96,50	96,61	96,48	96,52
Kabupaten Sragen	92,22	91,89	92,27	91,40	91,62
Kabupaten Wonogiri	90,73	90,70	91,13	91,41	91,01
Kabupaten Sukoharjo	97,01	96,89	96,73	96,58	96,49
Kabupaten Klaten	96,46	96,54	96,00	96,04	96,17
Kabupaten Boyolali	92,48	92,96	93,24	93,50	94,19
Kota Surakarta	96,73	96,74	96,82	96,72	96,84
Jawa Tengah	92,22	91,94	91,95	91,89	92,18
Indonesia	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Kabupaten/Kota di wilayah karesidenan Surakarta pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Nilai indeks pembangunan gender pada tahun tersebut menunjukkan terdapat perbaikan dalam kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa nilai indeks pembangunan gender jaraknya mendekati angka 100.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota di wilayah karesidenan Surakarta pada tahun 2016-2020 masih rendah dan belum mampu melampaui rata-rata indeks pemberdayaan gender nasional. Indeks pemberdayaan gender terbentuk dari tiga indikator peran aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan. Berdasarkan perkembangan indeks pemberdayaan gender di wilayah karesidenan Surakarta tahun 2016-2020 masih berada pada kategori menengah ke bawah artinya tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan masih rendah dan hasilnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indeks pemberdayaan gender kabupaten/kota di wilayah karesidenan surakarta tahun 2016-2020 (angka indeks)

Wilayah	Indeks Pemberdayaan Gender				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Karanganyar	77,38	74,27	80,51	74,76	74,29
Kabupaten Sragen	60,92	62,28	62,48	65,07	65,20
Kabupaten Wonogiri	60,16	64,04	63,80	71,88	71,56
Kabupaten Sukoharjo	75,20	76,11	76,17	78,52	77,98
Kabupaten Klaten	55,02	59,60	60,26	72,35	69,42
Kabupaten Boyolali	58,11	66,28	65,61	81,88	81,95
Kota Surakarta	76,09	77,25	77,10	77,88	79,42
Jawa Tengah	74,89	75,10	74,03	72,18	71,73
Indonesia	71,39	71,74	72,10	75,24	75,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RLSP), dan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan. Strategi dan kebijakan pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi hal tersebut harus didukung agar seluruh lapisan masyarakat lebih mengutamakan kesetaraan gender. Mengingat sampai saat ini masih banyak permasalahan kesenjangan pencapaian pembangunan laki-laki dan perempuan maka diperlukan program-program untuk mendukung pembangunan kualitas perempuan agar menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Untuk mengevaluasi sejauh mana prioritas pembangunan sudah responsif terhadap gender dapat dilihat dari analisa data terpilah gender. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian pembangunan berbasis gender maka akan memberikan gambaran nyata tentang besar kecilnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dengan perempuan.

Menurut Anugrah (2017) partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi adalah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Dimana perempuan sebagai *Agen of Development* yang perannya dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian. Dalam aspek ekonomi perempuan banyak yang memutuskan untuk bekerja di ranah publik dan masuk di dunia kerja memilih jenis pekerjaan yang berhubungan dengan jenis pekerjaan domestik. Banyak juga perempuan yang memilih untuk bekerja di sektor informal. Padahal partisipasi perempuan di sektor formal menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan bahkan menjadi indikator yang dilihat dalam profesionalisme misalnya Pegawai Negeri Sipil Perempuan (6).

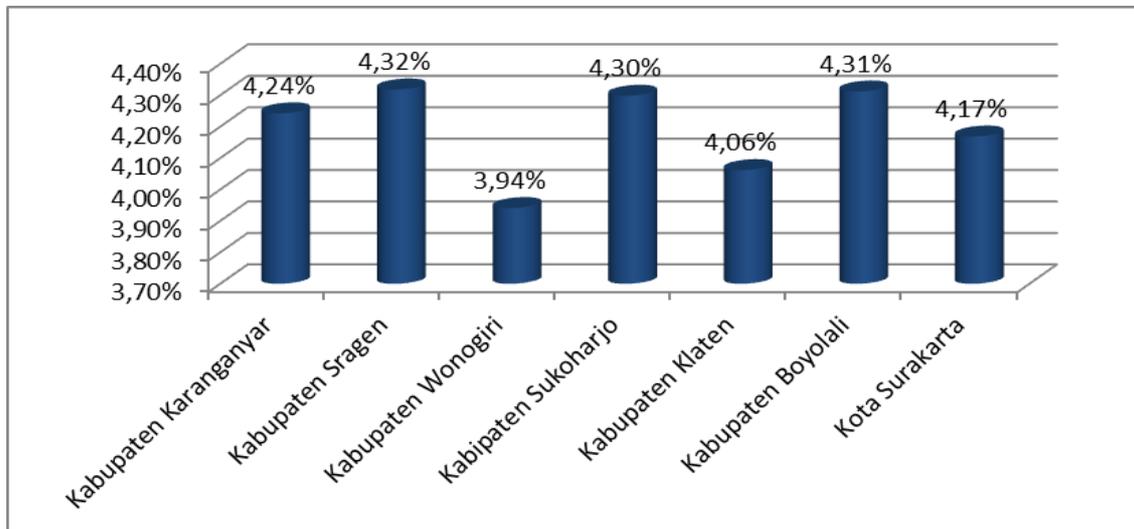
Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender sudah dapat diukur, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Laporan

Pembangunan Manusia tahun 1995. Dari angka IPG ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai perkembangan pencapaian pembangunan yang sudah mengakomodasi aspek-aspek gender (6).

Todaro, (2004) mengatakan bahwa pembangunan merupakan untuk memperbaiki kualitas kehidupan terutama di negara-negara yang paling miskin, kualitas hidup yang lebih baik yaitu dengan mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi, namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Hal lain yang harus diperjuangkan antara lain : pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan kerja, perbaikan kondisi lingkungan hidup, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan kebudayaan. Dengan demikian pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, yang dimana tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan keadaan perekonomian pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan lebih efektif apabila diiringi dengan kualitas sumber daya manusia dan berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam peranannya ataupun perolehan hak-hak atas meningkatnya perekonomian. Perempuan yang seringkali menjadi penerima pasif dari manfaat pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan yang berlangsung tidak akan menyisakan masalah kesenjangan gender.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah karesidenan Surakarta pada tahun 2016-2020 mengalami naik turun. Kabupaten Sragen menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di karesidenan Surakarta yaitu sebesar 4,32 persen. Kabupaten Boyolali menempati posisi kedua dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,31 persen. Posisi ketiga ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo sebesar 4,30 persen. Posisi keempat ditempati oleh Kabupaten Karanganyar sebesar 4,24 persen. Posisi kelima ditempati oleh Kota Surakarta sebesar 4,17 persen. Selanjutnya di posisi keenam ditempati oleh Kabupaten Klaten sebesar 4,06 persen. Posisi terendah nilai pertumbuhan ekonomi berada di Kabupaten Wonogiri sebesar 3,94 persen. Ketimpangan gender yang tinggi akan membuat pertumbuhan ekonomi rendah, begitu sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri rendah yang disebabkan tingginya ketimpangan gender dan hasilnya disajikan pada Grafik 1.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah karesidenan surakarta tahun 2016-2020 (persen)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan memusatkan pengamatan pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RLSP), dan Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan terhadap Pembangunan Ekonomi di Wilayah Karesidenan Surakarta tahun 2016-2020. Alasan peneliti memilih hal tersebut karena saat ini kesetaraan gender sudah mempunyai hak, kewajiban bahkan keadilan dalam hal pembangunan gender, bahkan dengan adanya peran atau kontribusi perempuan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga peneliti berniat menggunakan judul dalam penelitian “Emansipasi Perempuan dalam Kontribusinya pada Pembangunan Ekonomi di Wilayah Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2020”.

2. Literatur Review

2.1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita riil penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi terjadi terus menerus yang bersifat dinamis dan dibarengi dengan perubahan-perubahan kelembagaan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan kenaikan dalam pendapatan perkapita riil. Kenaikan pendapatan perkapita riil mengindikasikan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat (7). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, antara lain perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi (8).

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan sejumlah nilai yang berasal dari sektor perekonomian di suatu daerah. Pengukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

digunakan untuk membantu membuat suatu kebijakan perekonomian di suatu daerah serta perencanaan ekonomi yang akan dilakukan kedepannya, mengevaluasi hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan, dan memberikan informasi gambaran kinerja perekonomian daerah. Kemampuan ini tumbuh dengan terwujudnya kenaikan output nasional secara terus menerus disertai kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (9).

2.2.1. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Menyatakan bahwa sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan dalam perekonomian. Maksudnya, jika dalam sumber daya ini belum digunakan dengan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam telah digunakan secara penuh.

Sumber daya insani atau jumlah penduduk memiliki peran yang pasif dalam proses pertumbuhan ekonomi. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Sedangkan stok modal menurut Smith, yaitu unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan ekonomi stok modal (10).

2.2.2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik (Robert Sollow dan Trevor Swan)

Menurut teori pertumbuhan Neo-Klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan persediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini berdasarkan pada anggapan yang diperoleh oleh Mazhab Klasik yang menyatakan bahwa perekonomian berada pada kondisi *full employment* sehingga faktor-faktor produksi sudah digunakan secara penuh (11).

Teori neo-klasik terbagi menjadi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi
- b. Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi
- c. Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi

2.3. Modal Manusia (*Human Capital*)

Todaro, (2000) menyatakan bahwa human capital dapat diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah bagi seseorang. Hal ini dijelaskan apabila semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak yang mengikuti pelatihan maka kemampuan dan keterampilan semakin tinggi. Sementara itu, kesehatan merupakan bidang yang saling terkait dengan pendidikan. Pendidikan yang tinggi dimiliki tanpa adanya tubuh yang sehat tidak menaikkan produktivitas. Selain itu, pendidikan tinggi juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran kesehatan seseorang.

2.4. Pembangunan Manusia

Manusia adalah sumber kekayaan bagi bangsa. Misi dari pembangunan yaitu membentuk bagaimana lingkungan tersebut menjadi nyaman bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan melakukan kehidupan yang produktif (14). Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang baik dan perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal ini terjadi di semua aspek kehidupan, baik ekonomi,

sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia merupakan pada manusia serta kesejahteraannya.

Konsep pembangunan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup bebas dan bermartabat. Sementara itu, pembangunan manusia membahas perluasan kapasitas individu dan komunitas untuk memperluas dalam upaya memenuhi aspirasinya. Konsep pembangunan manusia juga mempunyai lingkup yang besar, pembangunan manusia mengibaratkan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, melainkan bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan “kesejahteraan” memandang manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam pembangunan. Dalam pembangunan manusia terdapat pendekatan kebutuhan dasar yang terfokus pada barang dan jasa. Pendekatan pembangunan manusia menghubungkan kemampuan manusia. Pembangunan manusia memandang isu dalam masyarakat seperti, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik maupun nilai-nilai kultur dari sudut pandang manusia. Selain itu membahas isu penting seperti gender (15).

2.5. Teori Gender

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya menciptakan perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Mansour Fakih mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya yang disebut konsep gender.

Peran dan hubungan gender sangat beragam antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Peran dan hubungan gender berkembang dari interaksi yang terjadi antara berbagai kendala biologis, teknologi, ekonomis, dan kendala sosial lainnya (17). Berkaitan dengan peran gender, Moser (1993) menjelaskan bahwa perempuan memiliki tiga peran yaitu:

a. Peran reproduktif

Merupakan peran yang dijalankan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan tugas rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan, seperti melahirkan atau mengasuh anak, memasak, dan lain-lain. Peran ini tidak hanya mencakup reproduksi biologis tetapi juga perawatan dan pemeliharaan angkatan kerja dan angkatan kerja mendatang.

b. Peran produktif

Adalah perang yang dilakukan laki-laki dan perempuan menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan.

c. Peran mengelola komunitas

Kegiatan yang dilakukan terutama perempuan di masyarakat, sebagai perluasan dari peran reproduksi perempuan, untuk menjamin pengadaan dan pemeliharaan sumber daya seperti, air, kesehatan, dan pendidikan. Peran ini merupakan pekerjaan sukarela yang tidak dibayar yang dilakukan dalam waktu bebas.

Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki dan perempuan. Masalah kesetaraan dan keadilan gender bukan menjadi perhatian kaum perempuan, tetapi menarik para ahli dan politisi. Edward Wilson dari Harvard University (1975) membagi perjuangan kaum

perempuan secara sosiologis atas dua kelompok besar, yaitu konsep nurture (konstruksi budaya) dan konsep nature (alami). Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*). Paham ini menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

2.5.1. Teori Nurture

Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan ini membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran serta kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsisten memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki yang cenderung mengejar kesamaan kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality*. Perjuangan ini sulit karena banyak hambatan, baik dari nilai agama maupun budaya. Dengan ini, aliran nurture melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proporsional dalam segala aktifitas masyarakat, seperti di tingkatan manajer, menteri, militer, DPR, Parpol dan lain sebagainya. Supaya tujuan tersebut tercapai, dengan membuat program khusus dalam upaya memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang terkadang berakibat timbulnya reaksi negatif dari kaum laki-laki karena apriori terhadap perjuangan tersebut. John B. Watson pada tahun 1925 mencetuskan bahwa pengalamannya mampu menuliskan segala pesan pada tabula rasa lembaran putih bersih sifat dasar manusia.

2.5.2. Teori Nature

Adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara dua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Edward L. Thorndike (1903) menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia, faktor yang menentukan adalah hereditas atau keturunan.

Talcott Parsons dan Bales (1979) berpendapat bahwa keluarga adalah unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Keharmonisan hidup didapat dan diciptakan apabila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, hal ini dimulai sejak dini atau melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan bersama dan dilandasi oleh komitmen dari suami istri dalam berkeluarga dan laki-laki maupun perempuan di dalam kehidupan masyarakat.

2.5.3. Teori Equilibrium

Teori *equilibrium* atau teori keseimbangan menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam mewujudkan gagasan ini, maka di dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingannya untuk peran perempuan maupun laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan melainkan komplementer, saling melengkapi satu sama lain. Karena, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah

kontekstual (yang berada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan bersifat universal.

R.J. Tawney mengemukakan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakekatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan juga struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu diisi serta dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

2.5.4. Teori Struktural-Fungsional

Teori struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang ditetapkan untuk melihat institusi keluarga. Teori ini berasumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi dari unsur-unsur tersebut dalam masyarakat (18). Menurut Talcott Parsons teori struktural-fungsional sebagai bagian keseimbangan dalam adanya institusi sosial, yang diakuinya akan eksis atau dikenal masyarakat apabila berhasil menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, tanpa memberikan perbedaan sedikitpun.

2.5.5. Teori Sosial Konflik

Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Sifat kepentingan diri akan menyebabkan diferensial kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan dan pertentangan antar individu pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat (18).

Dalam masalah gender, teori sosial-konflik identik dengan teori Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx dilengkapi oleh F.Engels, mengemukakan suatu gagasan bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat.

2.5.6. Teori Feminisme Liberal

Teori ini pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Dengan demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Beberapa hal masih tetap ada perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat (18).

Alison Jaggar dalam bukunya *Feminist Politics and Human Nature*, mengemukakan bahwa dalam pemikiran kaum liberal, sifat dasariah manusia yang unik adalah kemampuan rasionalitasnya. Namun argumen klasik Aristoteles bahwa manusia adalah *animal rationale* (binatang yang beresiko) maka kaum liberal mendefinisikan rasionalitas dalam berbagai aspek termasuk penekanan terhadap moralitas dan kebijaksanaan (19).

2.5.7. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Feminisme ini mempunyai tujuan untuk mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan *division of labour*, termasuk di dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori *praxis* Marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, supaya kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan “kelas” yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini merupakan usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk merubah keadaan (18). Berbeda dengan teori sosial-konflik, teori ini tidak terlalu menekankan pada faktor akumulasi modal atau kepemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi. Teori ini lebih mengamati faktor seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya. Menurut Rosemary Hennessy dan Chrys Ingraham (1997:4), feminisme marxis-sosialis melihat budaya sebagai suatu arena produksi sosial, arena dimana feminis berjuang daripada melihat budaya sebagai suatu kehidupan sosial secara keseluruhan.

2.5.8. Teori Feminisme Radikal

Teori ini berkembang di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxis-sosialis, tetapi teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggap sebagai institusi yang mengesahkan dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Elsa Gidlow mengemukakan teori bahwa menjadi lesbian merupakan telah terbebas dari dominasi laki-laki, baik internal maupun eksternal. Martha Shelly memperkuat bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri (18).

Menurut Bhasin (dalam Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, 2007) feminisme radikal menganggap bahwa perbedaan gender dijelaskan melalui perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Menurut aliran ini kekuasaan laki-laki atas perempuan, yang didasarkan pada kepemilikan dan kontrol kaum laki-laki atas kapasitas reproduksi perempuan telah menyebabkan penindasan pada perempuan. Hal ini mengakibatkan ketergantungan perempuan secara fisik dan psikologis kepada laki-laki (20).

2.5.9. Teori Ekofeminisme

Teori ekofeminisme diperkenalkan oleh Francoise d'Eaubonne pada tahun 1974. Dalam penerapannya, ekofeminisme menerapkan etika kepedulian untuk mewujudkan keadilan sosial secara ekologis, mengutamakan nilai feminitas dan menentang budaya patriarki. Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin rusak. Teori ini mempunyai konsep yang bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern. Teori-teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya (18).

2.5.10. Teori Psikoanalisa

Teori ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki maupun perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas

struktur, yaitu id, ego, dan superego. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur tersebut. Id sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis sejak lahir. Id bagaikan sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap kedua sumber lainnya. Ego bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari id. Ego berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif dan individual dan tuntutan objektif realitas sosial. *Superego* berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu mengingatkan *ego* agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol *id* (21).

2.6. Indeks Pembangunan Gender

Kata gender berarti sebagai kelompok laki-laki dan perempuan atau perbedaan jenis kelamin. Konsep gender melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial maupun budaya. Bentuk sosial laki-laki dan perempuan adalah perempuan dikenal dengan lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional dan jantan. Tetapi sifat diatas dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga, dikatakan gender memiliki arti sebagai konsep sosial yang membedakan peran laki-laki maupun perempuan.

United Nation Development Program (UNDP) tolak ukur keberhasilan pembangunan melalui formula *Human Development Indeks* (HDI). Karena ada isu kesetaraan gender maka menyusun perspektif gender, yaitu *Gender Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM). GDI dikhususkan pada pencapaian kaum perempuan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dan pendapatan per kapita. Sedangkan GEM memfokuskan pencapaian perempuan dalam sosial, ekonomi, dan politik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang disesuaikan dengan GDI maupun GEM. IPG mengukur kemampuan yang sama dengan IPM, yaitu harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan perkapita. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya jika IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan sosial (18).

2.7. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan sejauh mana peran aktif perempuan di dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi Indeks Pemberdayaan Gender.

Indeks Pemberdayaan Gender didapat dari rata-rata aritmatik dari ketiga indeks yang dibentuk maka diperoleh tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meskipun sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dilihat dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

United Nations of Development Programme (UNDP) terdapat tiga aspek penting dalam partisipasi perempuan yaitu:

1. Partisipasi dalam bidang politik dapat dilihat berdasarkan jumlah persentase laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen.

2. Partisipasi dalam ekonomi yang dihitung berdasarkan dua indikator yaitu jumlah persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai legislator serta jumlah yang bekerja sebagai tenaga profesionalisme.
3. Penguasaan sumber daya ekonomi yang berasal dari pendapatan yang diterima laki-laki maupun perempuan.

2.8. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik mengalami peningkatan namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat lokal, maupun nasional masih terhitung rendah. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan kemungkinan akan mempertegas marginalisasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial pada tingkatan lokal. Ini merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, keptaiaan, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Pada hakikatnya sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai *affirmative action*, dimana perempuan mendapatkan kuota 30 persen dalam aktivitas politik, termasuk didalamnya pencalonan dari partai politik dalam mendapatkan kedudukan pada kursi di parlemen, akan tetapi pada kenyataannya keterwakilan perempuan dalam politik hanyalah sebagai pengisi dan pemenuhan syarat agar partai politik tidak didiskualifikasikan dari proses pemilihan umum saja. Sistem keterwakilan perempuan menjadi proses pembelajaran dalam rangka partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, hak dan kewajibannya sebagai warga negara suatu bangsa. Jika telah memutuskan untuk terjun dalam panggung politik, para perempuan harus menyadari bahwa keterwakilannya dalam aktivitas politik dengan tuntutan penyetaraan gender secara alamiah tidak bisa dituntut kembali.

2.9. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk pada usia 15 tahun ke atas yang dimana telah menyelesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata lama sekolah mengindikasikan semakin tingginya dalam pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsinya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang pernah ditempuh seseorang, maka semakin tinggi kualitas seseorang tersebut, baik secara pola pikir maupun pola tingkahnya.

Stephan dan Francesca (2008), mengemukakan bahwa dengan pendidikan yang lebih baik, perempuan dapat melakukan aktivitas ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif dan kesetaraan gender dalam pendidikan melalui peningkatan dalam insentif dan kesempatan dalam mendidik perempuan. Perempuan yang berpendidikan tinggi cenderung mempunyai anak yang lebih sedikit. Penurunan dalam fertilitas juga bersosialisasi dalam kesetaraan gender yang lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (23).

2.10. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Dapat dijelaskan pegawai merupakan orang yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan menerima imbalan.

Menurut Tambunan (1992), Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan bagian dari penduduk yang secara ekonomis potensial untuk terjun ke dalam pasar tenaga kerja dan bertindak sebagai angkatan kerja. Dengan demikian tidak dapat dibedakan atas dasar gender, ketika seseorang sudah berada dalam jajaran pasar tenaga kerja. Secara makro, setiap orang yang berada dalam jangkauan pasar tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, akan bersaing ketat untuk memperoleh pekerjaan. Mengingat bahwa dalam jenjang pendidikan saat ini antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan hak dan kesempatan kerja juga menjadi semakin terbuka bagi perempuan, maka partisipasi TKW terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan meningkatnya kualitas TKW, meningkatnya kebutuhan TKW dalam arti terbuka lebih banyak kesempatan kerja bagi TKW.

3. Metode

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah karesidenan Surakarta, yaitu sebanyak 6 Kabupaten 1 Kota. Waktu penelitian yang digunakan tahun 2016-2020. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Variabel penelitian meliputi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, keterlibatan perempuan di parlemen, rata-rata lama sekolah perempuan, dan jumlah pegawai negeri sipil perempuan. Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi. penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Sesuai dengan tujuan penelitian dan pengembangan teori, maka model ekonometrika pada penelitian ini sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPG_{it} + \beta_2 IDG_{it} + \beta_3 KPP_{it} + \beta_4 RLSP_{it} + \beta_5 JPNSP_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

di mana:

- PE : Pertumbuhan Ekonomi (%)
 IPG : Indeks Pembangunan Gender (angka indeks)
 IDG : Indeks Pemberdayaan Gender (angka indeks)
 KPP : Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)
 RLSP : Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (tahun)
 JPNSP : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan (jiwa)
i : Kabupaten/Kota ke-*i* (*cross section*)
t : Tahun ke-*t* (*time series*)
 β_0 : Konstanta
 $\beta_1 \dots \beta_5$: Koefisien Regresi Variabel Independen
 ε : Error Term (faktor kesalahan)

3.1. Pengujian Statistik

3.1.1. Koefisien Determinasi

Fungsi dari koefisien determinasi (R^2) adalah untuk menunjukkan apakah variabel independen dapat menjelaskan varians variabel dependen dengan baik. Nilai R^2 mencapai angka 0 hingga 1. Sebuah model time series apabila R^2 mencapai angka 0 berarti variabel independen pada model tersebut lemah dalam menjelaskan variabel dependen.

3.1.2. Uji F (Simultan)

Model eksis jika seluruh variabel bebas secara simultan terdapat pengaruh terhadap variabel terikat. Uji eksistensi model adalah uji F. Pada riset ini, pada dugaan sementara adalah $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh variabel terikat; $H_A: \beta_1 \neq 0 \mid \beta_2 \neq 0 \mid \beta_3 \neq 0 \mid \beta_4 \neq 0 \mid \beta_5 \neq 0$, variabel bebas secara serentak mempengaruhi variabel terikat. Hipotesis null tidak ditolak jika nilai probabilitas statistik $F > \alpha$; hipotesis null tidak diterima jika nilai probabilitas $F \leq \alpha$.

3.1.3. Uji Validitas Pengaruh

Uji Parsial untuk menganalisis tingkat validitas dari variabel tidak terikat secara individual atau masing-masing variabel. Uji parsial adalah uji t. Hipotesis null pada uji parsial adalah $\beta_i = 0$, variabel bebas pada urutan ke-i tidak berpengaruh secara signifikan; dan hipotesis alternatifnya $\beta_i \neq 0$, variabel bebas pada urutan ke-i mempunyai pengaruh yang signifikan. Hipotesis null dikatakan akan diterima jika nilai probabilitas $t > \alpha$; hipotesis null tidak diterima jika besarnya probabilitas $t \leq \alpha$.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Chow

Uji Chow dipakai untuk menentukan model terestimasi PLS atau FEM. H_0 uji Chow: model terestimasi adalah *Pooled Least Square* (PLS), dan H_A -nya: model terestimasi adalah *Fixed Effect Model* (FEM). H_0 diterima jika nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $F > \alpha$; H_0 ditolak bila nilai p (p -value) probabilitas atau signifikansi empirik statistik $F > \alpha$. Hasil uji Chow dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil uji chow

Statistik	Nilai	d.f	Prob.
<i>Cross-section F</i>	4,007163	(6, 23)	0,0068

Dari Tabel 3, terlihat nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F sebesar 0,0068 ($< 0,05$), Jadi H_0 ditolak. Kesimpulannya, model terestimasi adalah FEM.

Uji Hausman

Uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi FEM atau REM. H_0 uji Hausman: model terestimasi adalah *Random Effect Model* (REM) dan H_A -nya: model terestimasi adalah *Fixed Effect Model* (FEM). H_0 diterima jika nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $\chi^2 > \alpha$; H_0 ditolak apabila nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $\chi^2 \leq \alpha$. Hasil uji Hausman dapat disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji hausman

Statistik	Nilai	d.f	Prob.
<i>Cross-section random χ^2</i>	45,535	6	0,0000

Dari Tabel 4, terlihat nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ^2 sebesar 0,0000 ($< 0,05$), jadi H_0 ditolak. Kesimpulannya, model terestimasi adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Dari uji Chow dan uji Hausman di muka, model *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model FEM tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil estimasi regresi data panel dengan metode FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	115.0079	138.7833	0.828687	0.4158
IPG	-0.017404	1.463330	-0.011894	0.9906
IDG	0.037656	0.315964	0.119178	0.9062
KPP	0.046731	0.294991	0.158415	0.8755
RLSP	-12.47101	2.326575	-5.360242	0.0000
JPNSP	-0.003421	0.001409	-2.428499	0.0234

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.609196	Mean dependent var	4.191429
Adjusted R-squared	0.422290	S.D. dependent var	2.931660
S.E. of regression	2.228274	Akaike info criterion	4.706192
Sum squared resid	114.1998	Schwarz criterion	5.239455
Log likelihood	-70.35837	Hannan-Quinn criter.	4.890274
F-statistic	3.259366	Durbin-Watson stat	2.266080
Prob(F-statistic)	0.008121		

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan hasil estimasi persamaan regresi data panel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

$$PE_{it} = 115.0079 - 0,0174IPG_{it} + 0,0376IDG_{it} + 0,0467KPP_{it} - 12,4710RLSP_{it} - 0,0034JPNSP_{it}$$

4.1. Koefisien Determinasi

Hasil dari pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,6092. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dalam model penelitian ini dapat dijelaskan sebesar 60,92% oleh variabel independen dalam model penelitian ini yaitu indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, keterlibatan perempuan di parlemen, rata-rata lama sekolah perempuan jumlah pegawai negeri sipil perempuan. Sedangkan sisanya 39,08%.

4.2. Uji F

Dari Tabel 5, terlihat nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,0081, yang berarti $< 0,01$; jadi H_0 ditolak, kesimpulan model yang dipakai dalam penelitian eksis.

4.3. Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen secara individual atau parsial. Uji validitas pengaruh memakai uji t. H_0 uji t $\beta_{1,2,3,4,5} = 0$ variabel independen ke i masing-masing tidak memiliki pengaruh signifikan; H_A -nya $\beta_{1,2,3,4} < 0$: variabel independen ke i memiliki pengaruh negatif signifikan; $\beta_5 > 0$ variabel independen ke i memiliki pengaruh positif signifikan. H_0 diterima jika nilai p (*p value*), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $t > \alpha$; H_0 ditolak jika nilai p (*p value*), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $t \leq \alpha$. Hasil uji validitas pengaruh dapat disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil regresi data panel uji t

Variabel	T	Sig.t	Kriteria	Kesimpulan
IPG	-0,017404	0,9906	> 0,10	Tidak Berpengaruh Signifikan
IDG	0,037656	0,9062	> 0,10	Tidak Berpengaruh Signifikan
KPP	0,046731	0,8755	> 0,10	Tidak Berpengaruh Signifikan
RLSP	-12,47101	0,0000	\leq 0,01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
JPNSP	-0,003421	0,0234	\leq 0,05	Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Dari Tabel 6, terlihat nilai p (p value), probabilitas, signifikansi empirik statistik t variabel Indeks Pembangunan Gender sebesar 0,9905 ($> 0,10$); variabel Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 0,9062 ($> 0,10$); variabel Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebesar 0,8755 ($> 0,10$); variabel Rata-rata Lama Sekolah Perempuan sebesar 0,0000 ($\leq 0,01$); dan variabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan memiliki nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik t sebesar 0,0234 ($\leq 0,05$). Dari hasil ini dapat disimpulkan variabel Rata-rata Lama Sekolah Perempuan dan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan secara individual memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen tidak memiliki pengaruh signifikan.

4.4. Interpretasi Model Terpilih

Variabel rata-rata lama sekolah perempuan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -12,4710. Pola hubungan antara rata-rata lama sekolah perempuan dengan pertumbuhan ekonomi adalah linier-linier. Sehingga apabila rata-rata lama sekolah perempuan akan naik sebesar 1 tahun maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 12,4710%. Sebaliknya, apabila rata-rata lama sekolah perempuan turun sebesar 1 tahun maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 12,4710%.

Variabel jumlah pegawai negeri sipil perempuan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,0034. Pola hubungan antara jumlah pegawai negeri sipil perempuan dengan pertumbuhan ekonomi adalah linier-linier. Artinya, jika variabel jumlah pegawai negeri sipil perempuan naik sebesar 1 jiwa maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,0034%. Sebaliknya, apabila jumlah pegawai negeri sipil perempuan menurun sebesar 1 jiwa maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat 0,0034%.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Indeks Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indeks pembangunan gender memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, setiap peningkatan angka indeks pembangunan gender maka akan menyebabkan nilai pertumbuhan ekonomi turun. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agnes Vera Yanti Sitorus (2016) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh negatif dan tidak signifikan indeks pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini karena dapat dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi perempuan. Masih terdapat ketimpangan gender dan belum mampu mengurangi gap secara nyata dalam pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi masih dominan didorong oleh peningkatan kapabilitas dasar penduduk laki-laki. Sehingga, keadilan gender dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya tercapai.



4.5.2. Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indeks pemberdayaan gender memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, setiap peningkatan dari variabel indeks pemberdayaan gender tidak memiliki pengaruh dan juga tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agnes Vera Yanti Sitorus (2013) yang menunjukkan bahwa variabel indeks pemberdayaan gender memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh positif dan tidak signifikan indeks pemberdayaan gender terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini terjadi karena di wilayah karesidenan Surakarta terdapat tingkat pendidikan perempuan yang terus meningkat maka akan meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi dan politik, sehingga semakin tinggi karir perempuan akan mempengaruhi pendapatan. Keikutsertaan peran perempuan dalam politik dan ekonomi sudah baik yaitu dengan adanya keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan yang hampir sejajar dengan laki-laki. Di wilayah karesidenan Surakarta pada tahun 2016-2020 perkembangan rata-rata indeks pemberdayaan gender tidak merata dikarenakan partisipasi perempuan dalam parlemen masih dibawah angka 30 persen yang tergolong dalam kategori rendah, berdasarkan pada UU No 10 tahun 2008 menyebutkan bahwa partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Sehingga partisipasi perempuan belum seutuhnya dapat berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4.5.3. Keterlibatan Perempuan di Parlemen terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keterlibatan perempuan di parlemen memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena partisipasi perempuan dalam politik dan ekonomi sudah baik yaitu dengan adanya keterlibatan perempuan dalam parlemen yang hampir sejajar dengan laki-laki. Akan tetapi partisipasi perempuan belum sepenuhnya dapat berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4.5.4. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah karesidenan Surakarta pada tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ely Kusuma Retno (2013) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif penyebabnya karena variabel yang disertakan dalam tingkat pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, Kejuruan, Diploma dan S1, sehingga kurang menunjukkan kualitas pendidikan yang menjadi beban dalam pertumbuhan ekonomi. Penyebab lainnya yaitu dikarenakan lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan lulusan dan lulusan perguruan tinggi yang belum maksimal terserap kerja. Tingginya perguruan tinggi belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah karesidenan Surakarta.

4.5.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah pegawai negeri sipil perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila nilai jumlah pegawai negeri sipil perempuan naik maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaan belum memberikan andil dalam peningkatan perekonomian di wilayah karesidenan Surakarta. Hasil

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fuji Astuti Harahap (2014) yang menyatakan bahwa dimana tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini yang dilakukan untuk mengkaji pengaruh variabel-variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan, Jumlah Pegawai Negeri Sipil terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi di wilayah karesidenan Surakarta tahun 2016-2020, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi data panel secara *cross section* maupun *time series* model terpilih adalah *Fixed Effect Model*.
2. Indeks Pembangunan Gender berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Keterlibatan Perempuan di Parlemen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan variabel yang disertakan dalam tingkat pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, Kejuruan, Diploma dan S1, sehingga kurang menunjukkan kualitas pendidikan yang menjadi beban dalam pertumbuhan ekonomi. Penyebab lainnya yaitu dikarenakan lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan lulusan dan lulusan perguruan tinggi yang belum maksimal terserap kerja. Tingginya perguruan tinggi belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah karesidenan Surakarta.
6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila nilai jumlah pegawai negeri sipil perempuan naik maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaan belum memberikan andil dalam peningkatan perekonomian di wilayah karesidenan Surakarta.
7. Hasil estimasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,6092 yang dapat diartikan 60,92%, artinya adalah 60,92% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independen, dan sisanya 39,08% variasi pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Referensi

- [1] Raswita, Ngakan Putu Mahesa Eka dan Utama, Made Suyana. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar*. 3, 2013, E-Jurnal EP Unu, Vol. 2, hal. 119-128.
- [2] Fajriyyah, Nurul dan Budiantara, I Nyoman. *Pemodelan Indeks Pembangunan Gender dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline di Indonesia*. 2, 2015, JURNAL SAINS DAN SENI ITS, Vol. 4, hal. 2337-3520.
- [3] Kemenpppa. *Emansipasi dan Kesetaraan Gender*. kemenpppa.go.id. [Online] 23 Maret 2017. [Dikutip: 29 Oktober 2021.]

- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1373/emansipasi-dan-kesetaraan-gender>.
- [4] Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018. kemenpppa.go.id. [Online] 24 Desember 2018. [Dikutip: 29 Oktober 2021.] <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/6a89b-buku-pmbg-2018.pdf>.
 - [5] Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah Dalam Angka. [pengar. buku] Badan Pusat Statistik. Surakarta : Badan Pusat Statistik, 2011, hal. 1-10.
 - [6] Wisnujati, Nugrahini Susantinah. Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro. 2, 2020, Journal Sosioagribis, Vol. 20, hal. 67-81.
 - [7] Arsyad, Lincolin. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE UGM, 1999.
 - [8] Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan. s.l. : Erlangga, 2006.
 - [9] Sukirno, Sadono. Makroekonomi Modern. Jakarta : PT. Rasa Grafindo Persada, 2000.
 - [10] Arsyad, Lincolin. Ekonomi Daerah: Pengantar Perencanaan Pembangunan Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE, 2006.
 - [11] Sukirno, Sadono. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
 - [12] Todaro, Michael P. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I. Jakarta : Erlangga, 2000.
 - [13] UNDP. Human Development Report. New York : Oxford University Press, 1990.
 - [14] Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia 20012-2014. Jakarta : BPS, 2016.
 - [15] World Bank. Pembangunan berprespektif. Jakarta : Dian Rakyat, 2005.
 - [16] Moser, CON. Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training. New York : Routledge, 1993.
 - [17] Megawangi, Ratna. Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender. Bandung : Mizan, 1999.
 - [18] Arivia, Gadis. Filsafat Berprespektif Feminis. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
 - [19] Sugihastuti dan Saptiawan, Itsna Hadi. Gender dan Inferioritas Perempuan (Praktik Kritik Sastra Feminis). Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2007.
 - [20] Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an . Jakarta : Paramadina. Cet. I, 1999.
 - [21] Sitorus, Agnes Vera Yanti. Dampak Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 1, 2016, Sosio Informa, Vol. 2, hal. 89-101.
 - [22] Klasen, Stephan dan Lamanna, Francesca. The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth in Developing Countries: Updates and Extensions. 2008, Journal Feminist Economics, Vol. 15.
 - [23] Harahap, Rahmi Fuji Astuti. Analisis Pengaruh Ketimpangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. s.l. : Universitas Diponegoro, 2014.
 - [24] Retno, Ely Kusuma. Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. s.l. : Universitas Negeri Surabaya, 2013.
 - [25] Sitorus, Agnes Vera Yanti. Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 1, 2013, Sosio Informa, Vol. 2.

- [26] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. s.l. : ISSN 2089-3531, 2020.
- [27] Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia 2012-2014*. Jakarta : BPS, 2016.